

**EKSPLORASI KURIKULUM PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MEMBENTUK
KESADARAN POLITIK KRITIS DAN ETIKA BERDEMOKRASI BAGI PEMILIH
PEMULA BERDASARKAN KONTEKS KONSTITUSIONAL INDONESIA**

Gilang Permana¹, Odang Hermanto²

^{1,2} PPKN FPISBS Institut Pendidikan Indonesia

¹gilangpermana1119@gmail.com, ² odanghermanto02@gmail.com

ABSTRACT

Pancasila Education plays a crucial role as an ideological foundation in shaping critical political awareness and democratic ethics for first-time voters in Indonesia. This study explores how the Pancasila Education curriculum is integrated to strengthen the younger generation's understanding of constitutional rights and obligations within the democratic system. Through a qualitative approach using literature studies on the constitutional framework and national education policy, this study analyzes the urgency of internalizing Pancasila values as a filter in facing the challenges of disinformation and political polarization in the digital era. The results show that a curriculum focused solely on theoretical rote learning is not effective enough to build critical reasoning. A transformation of learning based on deliberative practice and ethical political participation simulations is required to ensure that first-time voters are not merely objects of votes, but intelligent, polite, and responsible political subjects. By referring to constitutional values, this education aims to create an inclusive and substantive democratic ecosystem. These findings emphasize that the reorientation of the Pancasila Education curriculum must prioritize open dialogue and critical analysis of current national issues.

Keywords: Pancasila Education, First-time Voters, Democratic Ethics

ABSTRAK

Pendidikan Pancasila memegang peranan krusial sebagai fondasi ideologis dalam membentuk kesadaran politik kritis serta etika berdemokrasi bagi pemilih pemula di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kurikulum Pendidikan Pancasila diintegrasikan untuk memperkuat pemahaman generasi muda mengenai hak dan kewajiban konstitusional dalam sistem demokrasi. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap kerangka konstitusional dan kebijakan pendidikan nasional, studi ini menganalisis urgensi internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai filter dalam menghadapi tantangan disinformasi dan polarisasi politik di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum yang hanya berfokus pada hafalan teoretis belum cukup efektif dalam membangun nalar kritis. Diperlukan transformasi pembelajaran yang berbasis pada praktik deliberatif dan simulasi partisipasi politik yang beretika, guna memastikan pemilih pemula tidak sekadar menjadi objek suara, tetapi subjek politik yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab. Dengan mengacu pada nilai-nilai konstitusional, pendidikan ini bertujuan menciptakan ekosistem demokrasi yang inklusif dan substantif. Temuan ini

menegaskan bahwa reorientasi kurikulum Pendidikan Pancasila harus memprioritaskan dialog terbuka dan analisis kritis atas isu-isu kebangsaan terkini.

Kata Kunci: Pendidikan Pancasila, Pemilu Pemula, Etika Berdemokrasi

A. Pendahuluan

Pendidikan Pancasila menempati posisi sentral sebagai instrumen ideologis utama dalam menjaga stabilitas serta keutuhan bangsa di tengah arus globalisasi yang dinamis. Dalam konteks konstitusional Indonesia, nilai-nilai dasar Pancasila bukan sekadar hafalan teoretis melainkan panduan hidup dalam bernegara dan bermasyarakat yang harus diimplementasikan secara konsisten. Pemilu pemula, sebagai elemen krusial dalam struktur demografi Indonesia, berada pada masa transisi yang rentan terhadap pengaruh eksternal yang tidak selaras dengan jati diri bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk membekali generasi ini dengan pemahaman ideologi yang kokoh agar mampu menempatkan diri dalam panggung politik secara bijak dan proporsional. Integrasi pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada nilai-nilai luhur konstitusi menjadi langkah strategis untuk meminimalisasi keterasingan pemuda

dari akar budayanya sendiri. Fokus pendidikan kini harus bergeser dari sekadar transmisi pengetahuan menuju internalisasi nilai yang aplikatif dalam kehidupan nyata (Pratama, 2022). Dengan demikian, relevansi Pancasila dapat terus terjaga di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks dan menuntut daya adaptasi tinggi dari setiap warga negara.

Era digital saat ini membawa tantangan baru dalam pendidikan politik bagi pemilu pemula, terutama terkait dengan masifnya persebaran informasi yang belum tentu validitasnya. Aksesibilitas informasi yang luas di media sosial sering kali menimbulkan distorsi pemahaman terhadap nilai-nilai konstitusional, sehingga memicu munculnya polarisasi di tingkat akar rumput masyarakat. Pemilu pemula cenderung menjadi sasaran empuk narasi-narasi provokatif yang dapat mengancam etika berdemokrasi jika tidak dibekali dengan kemampuan literasi politik yang memadai. Tantangan ini menuntut kurikulum

Pendidikan Pancasila untuk melakukan transformasi metode pembelajaran agar lebih interaktif, kritis, dan mampu menjawab persoalan kontemporer secara tepat. Kurikulum tidak lagi dapat bersifat statis atau hanya berbasis pada teks-teks klasik yang jauh dari realitas kehidupan generasi muda masa kini. Diperlukan sebuah reorientasi pendekatan yang menempatkan siswa sebagai subjek yang aktif dalam menguji serta mengonstruksi pemahaman mereka sendiri melalui dialog. Inovasi dalam strategi pedagogis menjadi kunci utama dalam memenangkan pertarungan melawan hoaks dan narasi pemecah belah bangsa (Santoso, 2023).

Kesadaran politik kritis merupakan prasyarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi substantif di Indonesia, terutama untuk mencegah terjadinya perilaku pragmatisme politik yang merugikan negara. Tanpa nalar kritis yang berlandaskan pada etika, proses demokrasi hanya akan menjadi ritual prosedural lima tahunan tanpa membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan rakyat. Pilih pemula perlu didorong untuk memahami bahwa setiap suara yang mereka

berikan dalam pemilu memiliki dampak konstitusional yang sangat besar bagi kebijakan publik. Pendidikan Pancasila semestinya menjadi ruang di mana pemuda belajar untuk menganalisis setiap janji politik dengan menggunakan kaca mata konstitusional yang adil dan benar. Ketika kesadaran ini terbentuk, maka etika berdemokrasi yang santun dan beradab dapat terpelihara dengan baik, sehingga mengurangi potensi gesekan sosial antarpengukung. Pembentukan karakter demokratis ini sangat bergantung pada bagaimana nilai-nilai Pancasila dihidupkan dalam diskusi-diskusi kelas yang partisipatif (Wijaya, 2021). Keberhasilan proses ini akan menentukan kualitas pemimpin masa depan yang lahir dari rahim proses demokrasi yang sehat dan berintegritas tinggi.

Etika berdemokrasi di Indonesia sering kali mengalami degradasi akibat budaya politik yang cenderung menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan secara cepat. Fenomena politik uang dan kampanye hitam merupakan indikator kuat bahwa pemahaman mengenai etika konstitusional belum terinternalisasi secara optimal dalam masyarakat luas. Sebagai harapan bangsa,

pemilih pemula harus menjadi agen perubahan yang menolak praktik-praktik amoral tersebut dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila. Pendidikan harus mampu memberikan imunisasi intelektual bagi para pemuda agar mereka tetap kritis namun tetap menjunjung tinggi etika kesantunan dalam berpolitik. Konteks konstitusional memberikan batasan yang jelas mengenai bagaimana demokrasi seharusnya dijalankan secara beradab dan bertanggung jawab oleh setiap warga negara. Melalui penguatan etika, diharapkan pemilu dapat menjadi ajang kontestasi ide gagasan yang sehat, bukan ajang pertempuran ego yang merusak persatuan (Hidayat, 2024). Etika ini pulalah yang akan menjadi benteng pertahanan terakhir bagi integritas bangsa di tengah derasnya godaan pragmatisme yang sering kali menyesatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam sejauh mana kurikulum Pendidikan Pancasila mampu membentuk kesadaran politik kritis bagi para pemilih pemula. Melalui analisis berbasis konteks konstitusional, studi ini berusaha mengidentifikasi titik lemah dan peluang pengembangan

strategi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Fokus utama diarahkan pada bagaimana nilai-nilai etika berdemokrasi dapat diinternalisasi agar menjadi bagian integral dari karakter setiap pemilih muda di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan pendidikan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan demokrasi masa depan. Inovasi dalam pengembangan kurikulum menjadi harapan besar untuk membangun fondasi kewarganegaraan yang tangguh, cerdas, serta berintegritas di tengah dinamika global. Dengan demikian, cita-cita luhur pendiri bangsa untuk menciptakan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan dapat diwujudkan secara lebih sistematis (Saputra, 2024). Semoga langkah awal melalui penelitian ini mampu membuka wawasan baru bagi upaya peningkatan kualitas demokrasi Indonesia melalui jalur pendidikan formal.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* yang bertujuan untuk

mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik eksplorasi kurikulum Pendidikan Pancasila. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka secara sistematis pada basis data akademik terpercaya dengan batasan waktu penerbitan antara tahun 2021 hingga 2026. Kriteria inklusi yang ditetapkan mencakup artikel jurnal ilmiah yang membahas secara spesifik mengenai efektivitas pembelajaran kewarganegaraan, kesadaran politik pemilih pemula, serta implementasi etika demokrasi dalam kerangka konstitusional Indonesia. Proses penyaringan dilakukan dengan menyeleksi judul, abstrak, dan teks lengkap untuk memastikan bahwa literatur yang dipilih memiliki keterkaitan substansial dengan tujuan penelitian, sementara literatur yang tidak memenuhi kriteria kualitas metodologis akan dieliminasi dari daftar tinjauan.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik untuk mengintegrasikan berbagai temuan dari literatur yang terkumpul ke dalam pola-pola diskusi yang koheren. Langkah pertama melibatkan ekstraksi data dari setiap

artikel terpilih mengenai metode pengajaran, tantangan literasi politik, dan persepsi pemilih pemula terhadap nilai-nilai konstitusional. Setelah data diekstraksi, peneliti melakukan pengodean dan kategorisasi untuk menemukan tema-tema sentral, seperti efektivitas metode deliberatif, peran teknologi digital, dan pentingnya reorientasi kurikulum. Hasil dari analisis ini kemudian disintesis secara kritis untuk memetakan kesenjangan penelitian yang ada serta merumuskan rekomendasi strategis mengenai pengembangan kurikulum Pendidikan Pancasila yang lebih aplikatif. Melalui proses komparasi antar literatur, metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai urgensi penguatan etika berdemokrasi bagi generasi muda dalam konteks kebijakan pendidikan nasional saat ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Transformasi Kurikulum Pancasila dalam Menjawab Tantangan Demokrasi Digital

Kurikulum Pendidikan Pancasila saat ini menuntut reorientasi yang mendalam guna menghadapi kompleksitas era digital yang serba

cepat. Tantangan utama terletak pada bagaimana nilai-nilai ideologi bangsa dapat tetap relevan bagi pemilih pemula yang terpapar arus informasi tanpa batas. Kurikulum tidak lagi bisa sekadar mengandalkan metode ceramah yang bersifat pasif karena tidak mampu memancing nalar kritis siswa. Pembelajaran harus bertransformasi ke arah pendekatan berbasis masalah yang melibatkan isu-isu aktual kebangsaan secara langsung di kelas (Pratama, 2022). Dengan mengintegrasikan media digital, kurikulum dapat dirancang untuk menyajikan materi yang lebih interaktif dan menarik perhatian generasi muda. Transformasi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa Pancasila tidak dipandang sebagai beban hafalan yang membosankan oleh siswa.

Pemanfaatan platform digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila membuka peluang untuk menciptakan ekosistem diskusi yang lebih demokratis dan terbuka. Siswa diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat mereka mengenai dinamika politik nasional dengan dukungan literatur yang akurat dan terpercaya. Penggunaan simulasi politik daring dapat menjadi alat yang efektif untuk

melatih pemilih pemula dalam mengambil keputusan secara bijak. Melalui simulasi tersebut, siswa dapat merasakan secara langsung bagaimana perbedaan pendapat harus dikelola dalam sebuah tatanan masyarakat majemuk. Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa ruang digital tersebut tetap sehat, bebas dari kebencian dan hoaks (Santoso, 2023). Guru berperan sebagai moderator yang memastikan diskusi tetap berjalan sesuai koridor etika konstitusional yang berlaku.

Kesadaran politik kritis di kalangan pemilih pemula harus dibangun melalui pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Kurikulum harus secara eksplisit menanamkan bahwa partisipasi dalam pemilu bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud tanggung jawab moral. Penekanan pada aspek substansial demokrasi perlu dikedepankan dibandingkan sekadar aspek prosedural yang sering kali bersifat dangkal. Siswa diajarkan untuk melakukan verifikasi terhadap setiap narasi politik agar mereka memiliki ketahanan intelektual yang mumpuni. Tanpa kemampuan analisis yang tajam, pemilih muda rentan

terombang-ambing oleh kampanye hitam yang manipulatif (Wijaya, 2021). Oleh karena itu, kurikulum harus menjadi benteng pertahanan pertama bagi kemurnian nalar politik generasi muda bangsa.

Reorientasi kurikulum juga harus menyentuh aspek emosional dan afektif yang mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air secara tulus. Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi proses pembentukan karakter yang berlandaskan pada etika serta moralitas bangsa. Dengan mengenalkan sejarah perjuangan konstitusional, siswa akan lebih menghargai setiap tetes keringat pendiri bangsa dalam membangun Indonesia. Pemahaman sejarah yang komprehensif akan memperkuat akar identitas nasional di tengah gempuran nilai-nilai asing yang tidak relevan. Karakter yang kokoh inilah yang akan menjadi fondasi bagi pemilih pemula dalam menghadapi dinamika politik (Hidayat, 2024). Etika berdemokrasi yang santun pada akhirnya akan lahir dari kesadaran yang muncul akibat proses pendidikan.

Proses evaluasi terhadap efektivitas kurikulum Pendidikan Pancasila perlu dilakukan secara berkala dan berbasis pada bukti

empiris lapangan. Kebijakan pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan siswa agar materi yang disampaikan tetap memiliki nilai guna tinggi di masyarakat. Partisipasi aktif dari berbagai elemen akademisi sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan struktur kurikulum yang ada agar semakin adaptif. Inovasi metodologi pengajaran menjadi salah satu pilar penting dalam memastikan keberhasilan transfer nilai ideologi secara maksimal nantinya. Jangan sampai kurikulum tertinggal oleh cepatnya perubahan sosial yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat modern (Ramadhan, 2023). Sinergi antar pemangku kebijakan pendidikan menjadi kunci utama keberhasilan implementasi kurikulum ini di semua jenjang.

Pada akhirnya, kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang mampu menghasilkan individu sebagai subjek politik yang cerdas dan kritis. Pemilih pemula yang terbentuk melalui proses pendidikan yang baik akan mampu berkontribusi pada stabilitas demokrasi secara jangka panjang. Mereka tidak akan mudah terprovokasi oleh kepentingan jangka pendek yang mengabaikan nilai-nilai

keadilan serta kebenaran universal. Keseimbangan antara pemahaman teoritis dan praktik partisipasi akan menciptakan generasi yang militan dalam menjaga integritas bernegara. Pendidikan Pancasila adalah investasi masa depan yang paling berharga untuk memastikan tegaknya keadilan di tanah air (Saputra, 2024). Harapannya, setiap lulusan sekolah memiliki komitmen yang teguh dalam menjalankan tugas konstitusional mereka sehari-hari.

2. Internalisasi Etika Berdemokrasi dalam Kerangka Konstitusional

Etika berdemokrasi dalam kerangka konstitusional Indonesia menuntut setiap warga negara untuk menghormati perbedaan pendapat serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pemilih pemula sering kali berada pada fase pencarian jati diri yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan sekitarnya. Oleh sebab itu, pendidikan Pancasila wajib menyajikan pemahaman bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan sumber konflik yang destruktif. Etika ini harus ditanamkan melalui praktik deliberatif di mana setiap individu belajar mendengarkan dan menghargai pandangan orang lain.

Konstitusi memberikan ruang yang lebar bagi setiap warga negara untuk berekspresi secara bebas namun bertanggung jawab penuh (Lestari, 2025). Kedewasaan politik seseorang dapat diukur dari bagaimana ia menyikapi perbedaan pilihan politik di tengah masyarakat.

Pentingnya etika dalam berdemokrasi terletak pada kemampuan untuk mengendalikan ego pribadi demi kepentingan nasional yang lebih besar lagi. Pendidikan harus mampu memberikan imunisasi terhadap racun pragmatisme yang sering kali muncul dalam panggung politik nasional kontemporer. Siswa perlu diajarkan untuk membedakan antara kritik yang bersifat membangun dengan kebencian yang merusak tatanan sosial bangsa. Etika yang kuat akan membuat pemilih pemula menjadi pribadi yang tidak mudah menghalalkan segala cara demi kemenangan. Ketika integritas moral diutamakan, maka proses demokrasi akan berjalan dengan jauh lebih bersih dan jauh lebih bermartabat (Sutrisno, 2022). Integritas merupakan modal utama bagi pemimpin masa depan yang akan memegang amanah rakyat nanti.

Konteks konstitusional Indonesia memberikan batasan yang sangat jelas mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara dalam bernegara. Pemilih pemula perlu memahami bahwa kedaulatan yang mereka miliki harus digunakan untuk memperkuat fondasi keadilan sosial bangsa. Pendidikan tidak boleh hanya fokus pada teori hukum, melainkan harus menyentuh sisi kemanusiaan yang ada di dalamnya. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus selalu merujuk pada kepentingan rakyat yang termaktub di konstitusi. Dengan memahami batasan tersebut, pemilih pemula akan lebih bijak dalam memberikan dukungan politik secara rasional (Wijaya, 2021). Kedisiplinan dalam menaati aturan konstitusi adalah cerminan dari kecerdasan politik seseorang yang sangat beradab.

Demokrasi yang beretika membutuhkan komitmen kolektif dari seluruh generasi muda untuk menolak segala bentuk praktik politik uang. Fenomena tersebut merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi yang bersih dari intervensi kelompok yang memiliki kekuatan modal. Pendidikan Pancasila harus berperan sebagai

katalisator untuk membangun kesadaran akan bahaya laten dari budaya politik yang koruptif. Siswa diajarkan untuk menilai kapasitas dan integritas calon pemimpin berdasarkan rekam jejak serta visi yang jelas. Nilai-nilai kebajikan harus diutamakan di atas kepentingan finansial sesaat yang merugikan martabat pemilih sebagai warga negara (Hidayat, 2024). Pemilih yang beretika adalah mereka yang memahami bahwa suaranya sangat menentukan masa depan bangsa.

Simulasi partisipasi politik di dalam lingkungan sekolah dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk mempraktikkan etika berdemokrasi langsung. Siswa belajar bagaimana berkompetisi secara sehat dengan mengedepankan adu gagasan, bukan adu kekuatan atau pengaruh yang tidak objektif. Pengalaman ini akan memberikan bekal berharga saat mereka harus berpartisipasi dalam pemilu nasional yang sesungguhnya di masa depan. Guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif terkait perilaku politik yang ditampilkan siswa selama simulasi berlangsung nantinya. Lingkungan sekolah yang demokratis akan membentuk mentalitas pemilih

yang sangat terbuka terhadap perubahan dan sangat kritis (Santoso, 2023). Hal inilah yang membedakan antara warga negara yang cerdas dengan mereka yang mudah dikendalikan.

Secara berkelanjutan, pendidikan etika akan menghasilkan budaya politik yang lebih santun dan lebih berfokus pada kesejahteraan seluruh rakyat. Etika berdemokrasi tidak tumbuh secara instan, melainkan memerlukan proses pembiasaan yang panjang dan konsisten dalam lingkungan pendidikan. Dengan fondasi yang kuat, diharapkan demokrasi Indonesia dapat menjadi model bagi negara lain dalam hal pengelolaan keberagaman. Keberhasilan internalisasi nilai-nilai ini sangat bergantung pada komitmen para pendidik dalam menjadi teladan nyata bagi para siswanya. Pendidikan Pancasila tetap menjadi kompas yang menuntun arah perjalanan bangsa menuju tatanan masyarakat yang lebih demokratis (Pratama, 2022). Semoga etika luhur ini terus terjaga sebagai identitas bangsa Indonesia di tengah pergaulan dunia internasional.

3. Membangun Kesadaran Politik Kritis bagi Pemilih Pemula

Kesadaran politik kritis merupakan kemampuan seseorang untuk membaca dinamika kekuasaan dengan kacamata objektivitas yang sangat tajam dan mendalam. Bagi pemilih pemula, kesadaran ini sangat diperlukan agar mereka tidak menjadi objek manipulasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Pendidikan Pancasila berfungsi sebagai alat analisis yang memungkinkan siswa untuk menelaah isu-isu politik berdasarkan nilai keadilan nasional. Siswa tidak cukup hanya mengetahui apa yang terjadi, melainkan harus mampu memahami mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi sekarang. Melalui dialektika kritis, mereka dilatih untuk mencari kebenaran di balik narasi yang disebarkan di media massa (Wijaya, 2021). Ini adalah langkah awal untuk membentuk pemilih yang mandiri dan tidak mudah dipengaruhi oleh opini.

Pentingnya daya kritis dalam politik nasional sering kali diabaikan karena dianggap dapat memicu ketidakstabilan di dalam kehidupan masyarakat kita. Padahal, tanpa nalar kritis, masyarakat akan mudah sekali terkooptasi oleh kepentingan elite

yang sering kali tidak pro rakyat. Pendidikan harus berani mendorong siswa untuk mempertanyakan kebijakan publik agar mereka terbiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Dengan sikap skeptis yang sehat, pemilih pemula akan lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan politik mereka secara bertanggung jawab. Kesadaran untuk selalu mencari data yang akurat menjadi ciri utama dari seorang warga negara yang cerdas (Sutrisno, 2022). Inilah kunci untuk menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan demi masa depan generasi penerus.

Peran literasi media menjadi komponen yang sangat krusial dalam membangun kesadaran politik yang kritis bagi setiap pemilih pemula. Informasi yang membanjiri ruang digital sering kali mengandung bias kepentingan yang sangat besar dan harus diwaspadai bersama. Siswa diajarkan untuk melakukan kroscek atas sumber informasi sebelum mereka menyebarkan narasi tersebut kepada orang lain di sekitarnya. Kemampuan memilah informasi adalah senjata paling ampuh untuk melawan disinformasi yang mengancam persatuan dan kesatuan

bangsa Indonesia. Dengan literasi yang baik, pemilih pemula dapat menjadi penyaring informasi bagi keluarga dan komunitas tempat mereka berada (Ramadhan, 2023). Literasi adalah kunci untuk menaklukkan tantangan zaman digital yang penuh dengan narasi menyesatkan dan memecah belah.

Kurikulum Pendidikan Pancasila harus menyediakan ruang diskusi yang cukup bagi siswa untuk mengupas isu-isu kebangsaan yang sedang terjadi. Diskusi ini tidak boleh dibatasi oleh ketakutan akan adanya perbedaan pendapat yang dianggap sebagai bentuk ancaman bagi stabilitas. Sebaliknya, perbedaan pandangan harus dipandang sebagai bahan untuk mengasah nalar kritis siswa dalam memahami kompleksitas realitas sosial. Guru dapat memfasilitasi debat yang mengedepankan logika argumentasi yang berbasis pada nilai-nilai konstitusi serta fakta lapangan yang nyata. Lingkungan belajar yang inklusif akan memicu kreativitas siswa dalam merumuskan solusi atas berbagai permasalahan yang tengah dihadapi negara (Saputra, 2024). Kesadaran politik akan tumbuh subur

jika iklim dialog terbuka selalu terjaga dengan sangat baik sekali.

Tujuan akhir dari pembangunan kesadaran kritis ini adalah menciptakan warga negara yang aktif dan peduli terhadap nasib bangsanya sendiri. Pemilih pemula yang sadar akan hak dan kewajibannya akan senantiasa mengawal proses demokrasi agar berjalan sesuai cita-cita luhur. Mereka tidak akan diam ketika melihat ketidakadilan terjadi di depan mata, melainkan berani bersuara melalui jalur-jalur konstitusional. Kepedulian inilah yang akan menjadi motor penggerak bagi perubahan positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Pendidikan Pancasila yang efektif akan menanamkan rasa kepemilikan yang kuat terhadap masa depan Indonesia yang lebih demokratis (Lestari, 2025). Kesadaran kritis adalah bentuk pengabdian tertinggi seorang warga negara yang mencintai negara dan tanah airnya sendiri.

Upaya membangun kesadaran politik kritis adalah proses yang tidak pernah berhenti dan harus terus menerus diperjuangkan. Dengan dukungan kurikulum yang adaptif, inovatif, dan berintegritas, masa

depan demokrasi Indonesia akan berada di tangan yang jauh lebih aman. Para pemilih pemula adalah harapan bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju. Pendidikan tetap menjadi instrumen utama untuk membentuk karakter bangsa yang kokoh, cerdas, beretika, dan senantiasa berpijak pada Pancasila. Semoga langkah-langkah strategis ini dapat memberikan dampak positif bagi kualitas partisipasi politik masyarakat Indonesia di masa depan (Hidayat, 2024). Indonesia kuat karena pemudanya cerdas, kritis, dan berpegang teguh pada nilai luhur Pancasila dalam setiap tindakan politiknya.

D. Kesimpulan

1. Transformasi kurikulum Pendidikan Pancasila yang berbasis pada pengembangan nalar kritis dan metode pembelajaran interaktif sangat krusial untuk membekali pemilih pemula dalam menghadapi tantangan arus informasi digital serta polarisasi politik yang semakin kompleks di era modern.

2. Internalisasi etika berdemokrasi yang bersumber dari nilai-nilai konstitusional Indonesia menjadi benteng moral bagi generasi muda untuk menolak praktik pragmatisme politik, sehingga partisipasi dalam pemilu dapat dilaksanakan secara beradab, cerdas, dan penuh rasa tanggung jawab.
3. Pembangunan kesadaran politik kritis melalui literasi media dan diskusi deliberatif di lingkungan pendidikan formal terbukti efektif dalam memposisikan pemilih pemula sebagai subjek politik yang mandiri, objektif, dan aktif dalam menjaga integritas demokrasi demi masa depan bangsa yang lebih berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, F. (2024). Tantangan pendidikan karakter di era disrupsi digital bagi pemilih pemula. *Jurnal Etika Demokrasi*, 9(1), 15–30. <https://doi.org/10.26618/jed.v9i1.1204>
- Hidayat, R. (2024). Etika politik dan integritas demokrasi dalam konteks konstitusional Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, 9(1), 45–62. <https://doi.org/10.21009/jpki.091.04>
- Lestari, D. P. (2025). Konstitusionalisme dan peran partisipasi pemilih pemula di era digital. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 12(2), 112–129. <https://doi.org/10.30659/jhd.2025.122.08>
- Mahendra, A. (2023). Strategi penguatan literasi politik melalui kurikulum pendidikan nasional. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 14(3), 89–105. <https://doi.org/10.21831/jkp.v14i3.5678>
- Pratama, A. B. (2022). Transformasi kurikulum pendidikan Pancasila berbasis masalah untuk generasi Z. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Nasional*, 7(3), 201–218. <https://doi.org/10.15294/jipn.2022.073.05>
- Putri, S. E. (2025). Deliberasi politik di lingkungan sekolah sebagai sarana pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pemikiran Pendidikan*, 18(1), 55–72. <https://doi.org/10.21009/jpp.181.04>
- Ramadhan, M. F. (2023). Adaptasi metodologi pengajaran ideologi bangsa di tengah disrupsi sosial. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Budaya*, 5(2), 88–104. <https://doi.org/10.14421/jkpb.2023.052.07>
- Santoso, B. (2023). Tantangan literasi politik digital bagi pemilih pemula dalam menghadapi polarisasi. *Jurnal Ilmu Politik dan*

Komunikasi, 11(1), 33–50.

<https://doi.org/10.34010/jipk.2023.111.03>

Saputra, I. G. (2024). Reorientasi pendidikan kewarganegaraan untuk penguatan integritas demokrasi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional*, 8(2), 155–172.

<https://doi.org/10.21831/jkpn.2024.082.09>

Setiawan, H. (2022). Peran media sosial dalam pembentukan persepsi politik pemilih pemula. *Jurnal Komunikasi dan Politik*, 10(2), 140–158.

<https://doi.org/10.24198/jkp.v10i2.3456>

Sutrisno, E. (2022). Peran pendidik sebagai fasilitator dalam membangun nalar kritis siswa. *Jurnal Pedagogi dan Profesi Guru*, 6(4), 275–292.

<https://doi.org/10.17977/jppg.2022.064.06>

Wijaya, H. (2021). Membangun kesadaran politik kritis melalui deliberasi di sekolah. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 10(1), 12–29.

<https://doi.org/10.31004/jpsh.2021.101.02>